

Penertiban Anak Jalanan oleh Satpol PP Di Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo

Street Children Regulation by Satpol PP Di Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo

Aldi Podungge^{1*)}, Funco Tanipu¹⁾, Dewinta Rizky R. Hatu¹⁾

¹⁾Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

*Corresponding Author: aldipodungge18@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of street children in Gorontalo City represents a complex social problem influenced by economic factors, environmental conditions, and weak family supervision. The presence of street children not only affects their own lives but also raises public order issues. Efforts by the Public Order Agency (Satpol PP) to manage street children have been implemented, yet remain ineffective as children tend to return to the streets after being removed. This study aims to evaluate the implementation of street children management by Satpol PP in Limba B, South City, Gorontalo, and to identify the obstacles faced during its execution. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving both street children and Satpol PP officers. The data were analyzed descriptively to gain an in-depth understanding of the phenomenon. Findings indicate that street children primarily work as buskers, street performers, and beggars, with family economic conditions as the main factor. The management efforts are temporary and lack deterrent effects due to budget constraints, limited ongoing guidance, weak inter-agency coordination, and environmental and peer influences. A more comprehensive and sustainable strategy is needed through enhanced inter-agency cooperation, adequate guidance facilities, and a humanistic social approach to support children's rights and effectively reduce the number of street children.

Keywords: *street children, Satpol PP, management, child guidance, social problem*

ABSTRAK

Fenomena anak jalanan di Kota Gorontalo merupakan masalah sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Keberadaan anak jalanan tidak hanya berdampak pada kehidupan mereka sendiri, tetapi juga menimbulkan masalah ketertiban umum. Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah dilakukan, namun belum efektif karena anak-anak cenderung kembali ke jalan setelah ditertibkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penertiban anak jalanan oleh Satpol PP di Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap anak jalanan dan aparat Satpol PP. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan umumnya bekerja sebagai pengamen, badut jalanan, dan pengemis, dengan latar belakang ekonomi keluarga sebagai faktor utama. Penertiban Satpol PP bersifat sementara dan belum memberikan efek jera, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, minimnya pembinaan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Diperlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan kerja sama antarinstansi, penyediaan fasilitas pembinaan yang memadai, serta pendekatan sosial yang humanis untuk mendukung pemenuhan hak anak dan mengurangi jumlah anak jalanan secara efektif.

Kata kunci: anak jalanan, Satpol PP, penertiban, pembinaan anak, masalah sosial

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian ilmiah, terutama yang menyoroti peran pemerintah dalam penanganannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rahma (2019) mengkaji peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan dan pelatihan keterampilan belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi anak jalanan dalam mengikuti program yang disediakan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitatif yang dilakukan pemerintah masih menghadapi kendala struktural dan kultural.

Dalam penelitiannya mengenai efektivitas penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya menemukan bahwa pelaksanaan razia belum mampu memberikan efek jera. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembinaan lanjutan yang terintegrasi setelah penertiban dilakukan (Pratama, 2021). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa pendekatan represif tanpa diimbangi dengan program pemberdayaan sosial hanya menghasilkan penanganan jangka pendek. Selain itu, penelitian oleh Wulandari (2022) menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan anak kembali ke jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan. Sementara itu, penelitian oleh Nasution dan Nasution & Siregar, (2018) menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani anak jalanan agar program yang dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai upaya pemerintah dalam menangani anak jalanan. Persamaan tersebut tampak pada analisis terhadap peran lembaga seperti Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan pembinaan maupun penertiban. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada kota besar dan menyoroti kebijakan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada wilayah Limba B Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan fokus pada implementasi penertiban oleh Satpol PP.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis terhadap batas kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban serta keterkaitannya dengan Dinas Sosial sebagai lembaga pembina. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti keterbatasan anggaran dan durasi pembinaan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa anak jalanan yang telah ditertibkan cenderung kembali ke jalan, sehingga penelitian ini memberikan gambaran kontekstual yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial yang terjadi di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penertiban anak jalanan oleh Satpol PP di Limba B Kota Selatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban anak jalanan oleh Satpol PP di wilayah tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam menangani anak jalanan masih belum efektif karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial-ekonomi yang mendorong anak kembali ke jalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo (Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, terutama terkait perilaku, interaksi sosial, dan kebijakan publik dalam penanganan anak jalanan. Pendekatan ini menekankan pemahaman fenomena secara kontekstual dan holistik melalui analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2020), sekaligus memberikan kesempatan untuk memahami motif, persepsi, serta pengalaman informan secara mendalam (Yusuf, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, karena wilayah ini masih ditemukan anak jalanan, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan mulai 20 Agustus 2024 hingga selesai, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengumpulan data secara bertahap untuk memastikan keakuratan dan konteks sosial yang relevan (Creswell, 2018; Fadli, 2021).

Data penelitian dikumpulkan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan informan, termasuk anggota Satpol PP dan anak jalanan, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penertiban serta hambatan yang dihadapi. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan secara langsung (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang aktivitas anak jalanan dan proses penertiban. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, yang bersumber dari dokumen resmi, laporan, foto kegiatan, dan literatur relevan. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data wawancara dan observasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan komprehensif. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti sekaligus meningkatkan keabsahan data penelitian (Anggito & Setiawan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban Anak Jalanan oleh Satpol PP di Limba B kota Selatan

Subjek penelitian ini adalah anak jalanan yang berada di Kota Gorontalo, khususnya di sekitar Masjid Baiturahim. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan survei lapangan yang mencakup sejumlah item pertanyaan berdasarkan indikator karakteristik anak jalanan. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan sesuai dengan indikator tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan aktivitas anak jalanan.

Salah satu subjek penelitian, Fd, merupakan anak jalanan berusia 10 tahun yang bekerja sebagai badut jalanan untuk memperoleh penghasilan. Fd memiliki seorang adik, Rm, yang berusia 7 tahun. Kedua anak ini tetap bersekolah, meskipun sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja di jalanan. Keluarga Fd tergolong keluarga dengan ekonomi sederhana; pekerjaan anak-anak di jalanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban keluarga. Fd bekerja setiap hari mulai sore hingga malam dan tinggal bersama ibu dan adiknya di Kelurahan Umialo, Kota Gorontalo. Dalam wawancara, Fd “Saya melakukan kegiatan ini di jalanan karena fokus mencari uang sebagai badut jalanan.” Wawancara ini menegaskan bahwa pekerjaan utama Fd adalah sebagai badut jalanan.

“...Menurut wawancara bersama fd dia mengatakan bahwa fd tinggal di umialo dan berumur 10 tahun, Menjadi badut jalanan tentunya kehidupan yang mereka jalani tidak sama dengan kehidupan orang normal pada umumnya, yang bekerja Sore dan pulang pada Malam harinya. Fd menjadi badut jalanan hanya untuk menghibur orang lain sekaligus menghibur dirinya sendiri dan untuk mendapatkan uang tambahan karena faktor ekonomi mereka lemah. Fd juga berpendapat jika ada yang memberinya rezeki menurutnya hal itu layak karena ia mengeluarkan usaha atau tenaga untuk menghibur banyak orang dan setiap hari fd mendapatkan uang dari badut jalan tidak menentu adakalanya hanya mendapt uang Rp 80.000.” (Fd/SatpolPP/20082024)

Fenomena badut jalanan di Kota Gorontalo umumnya dilakukan oleh anak-anak pelajar, termasuk usia dini antara 7–10 tahun. Aktivitas ini sering dipandang sebagai simbol perilaku menyimpang dalam kehidupan sosial karena anak-anak menampilkan keceriaan untuk menghibur orang lain sambil menutupi kesedihan mereka dengan “topeng badut”. Faktor ekonomi menjadi alasan utama anak-anak terpaksa bekerja di jalanan, meskipun usia mereka seharusnya difokuskan pada

pendidikan di sekolah. Kondisi ekonomi keluarga membuat anak-anak secara langsung merasakan dampak terhadap pendidikan mereka.

Alasan utama anak-anak memilih menjadi badut jalanan adalah untuk membantu keluarga. Fd mengungkapkan bahwa ia diajak temannya menjadi badut karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sulit. Fd merasa senang dapat membantu orang tuanya, dan penghasilan yang diperoleh digunakan sebagian untuk menyewa kostum, sementara sisanya dibawa pulang untuk keluarga. Kedua orang tuanya menghargai kontribusi anaknya, meskipun jumlahnya tidak besar, karena tetap meringankan beban keluarga.

Wawancara dengan Rm menunjukkan kondisi yang serupa. Rm bekerja sebagai badut jalanan untuk menghibur orang lain sekaligus memperoleh penghasilan tambahan. Pendapatan harian Rm tidak menentu, kadang hanya sekitar Rp 70.000, tergantung kemurahan orang-orang yang memberinya. Menurut Rm, setiap penghasilan yang diperoleh layak karena merupakan hasil dari usaha dan tenaga yang dikeluarkan. Kehidupan mereka sebagai badut jalanan jelas berbeda dari anak-anak pada umumnya, baik dari segi waktu kerja maupun kegiatan sehari-hari, sehingga pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai dampak ekonomi dan sosial dari fenomena anak jalanan di Kota Gorontalo.

“...Hasil wawancara bersama NH dia mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga miskin dan tinggal di jalan andalas, umur Nh 12 tahun dan dia masih bersekolah. Dia menjadi pengemis di karenakan ekonomi dari orang tuanya kurang mampu dan dia mengikuti temannya yang notabennya juga sama menjadi pengemis.” (NH/SatpolPP/20082024)

Wawancara dengan subjek Nh mengungkapkan bahwa ia berasal dari keluarga miskin dengan orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Motivasi anak-anak jalanan untuk berada di jalanan sebagian besar muncul karena tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Banyak anak merasa terbatas oleh peraturan yang dibuat oleh orang tua mereka sendiri. Penghasilan yang diperoleh dari mengemis tidak menentu, kadang hanya sekitar Rp 50.000 per hari.

Berdasarkan temuan lapangan, alasan anak-anak berada di jalanan dapat dikategorikan menjadi empat: pertama, untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga; kedua, mencari kompensasi dari kurangnya perhatian keluarga; ketiga, sekadar memperoleh penghasilan tambahan; dan keempat, sebagai bentuk rekreasi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak jalanan memilih berada di jalanan untuk bersenang-senang, menjalin pertemanan baru, menyalurkan hobi bermusik melalui kegiatan mengamen, serta memperoleh pengakuan dari masyarakat. Namun, perilaku mereka kerap menyimpang, seperti duduk-duduk di jalanan, menumpang truk atau kendaraan terbuka, berpakaian tidak rapi, dan menggunakan hasil penghasilan untuk kegiatan negatif, yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat.

Beberapa faktor penyebab anak-anak turun ke jalan antara lain: (1) kondisi ekonomi keluarga yang miskin, (2) kekerasan dalam keluarga yang menjadi beban psikologis bagi anak-anak, dan (3) pengaruh lingkungan sosial, termasuk teman sebaya atau masalah di sekolah. Temuan juga menunjukkan bahwa anak jalanan dengan latar belakang perceraian atau ketidakharmonisan keluarga lebih rentan terlibat dalam perilaku kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Selain faktor internal, hambatan eksternal juga memengaruhi efektivitas program pembinaan anak jalanan. Salah satu penghambat utama adalah kurangnya kerja sama antarinstansi terkait, khususnya antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Proses pembinaan, termasuk pengumpulan anak jalanan, sebagian besar dilakukan langsung oleh Dinas Sosial tanpa kontribusi signifikan dari Satpol PP. Kondisi ini menyebabkan program pembinaan belum berjalan efektif karena minimnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi.

Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah yang melarang kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti mengemis, mengamen di lampu merah, atau berjalan di lokasi terlarang. Dalam operasinya, Satpol PP fokus pada penertiban ruang publik

sekaligus melakukan pendekatan untuk menjangkau anak-anak jalanan. Namun, tanpa dukungan kerja sama yang memadai dari Dinas Sosial dan instansi lain, upaya penertiban dan pembinaan anak jalanan sulit mencapai hasil yang optimal.

“...Berdasarkan hasil Wawancara bersama ibu Herni sekretaris Dinas Sosial dia mengatakan bahwa diketahui jumlah pengemis yang ada di Kota Gorontalo pada tahun 2022 berjumlah 3 dan tahun 2023 berjumlah 4 oarang orang mereka berasal dari kelurahan dan kecamatan yang berbeda dan beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama. Rata-rata jenis permasalahan yang mereka alami oleh para pengemis sama yaitu karena faktor ekonomi.” (H/SatpolPP/20082024)

Berdasarkan wawancara dengan Herni, Sekretaris Dinas Sosial Kota Gorontalo, diketahui bahwa program pembinaan pengemis biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Namun, pada tahun 2022, pembinaan dilakukan dua kali karena jumlah anak jalanan yang cukup banyak. Efektivitas pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung pada komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan Satpol PP. Kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam program pembinaan, di mana Satpol PP bertugas menertibkan anak jalanan dan mengantarkan mereka ke kantor Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Wawancara dengan anggota Satpol PP pada 12 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penertiban anak jalanan adalah kurangnya kerja sama dengan instansi terkait. Selama ini, pengumpulan anak jalanan untuk pembinaan sebagian besar dilakukan oleh Dinas Sosial, sehingga proses pembinaan belum berjalan efektif. Satpol PP berupaya membantu Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengurangi jumlah pengemis dan anak jalanan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, namun keterbatasan anggaran membatasi durasi pembinaan, biasanya hanya satu hari. Kondisi ini membuat aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera, sehingga anak jalanan tetap leluasa bergerak kembali.

Anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan, baik legal maupun ilegal, untuk bertahan hidup. Aktivitas mereka antara lain mengamen, menjadi badut jalanan di lampu merah, berdagang asongan, atau mengumpulkan barang bekas. Seorang badut jalanan dapat memperoleh sekitar Rp 100.000 dalam satu malam. Motif utama mereka adalah bertahan hidup karena keterbatasan pilihan, kurangnya keterampilan, dan pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku mereka. Keputusan ini bersifat sementara, diiringi harapan mencari peluang kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Fenomena anak jalanan juga menunjukkan bahwa banyak hak asasi anak yang hilang. Keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, dan LSM memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, kenyataannya perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Banyak anak jalanan yang masih dieksploitasi oleh orang tua atau pihak lain demi keuntungan tertentu. Keberadaan anak-anak ini di jalanan membuat mereka rentan terhadap situasi berbahaya, kekerasan fisik, dan keterlibatan dalam tindak pidana. Fenomena ini menegaskan bahwa perkembangan anak jalanan merupakan masalah sosial yang serius dan membutuhkan perhatian serta intervensi terpadu dari berbagai pihak.

Dampak Anak Jalanan Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap anak jalanan di Limba B, Kota Gorontalo, terkait dengan dampak sosial yang beragam, mulai dari rasa terharu, sedih, gembira, hingga marah. Beberapa responden mengungkapkan bahwa keberadaan anak jalanan menimbulkan masalah sosial, seperti gangguan perkelahian, perilaku radikalisme, pergaulan bebas, dan hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang seharusnya bersekolah. Salah satu informan menyatakan:

“Torang Yang ada di daerah sini di limba B sudah merasakan depe dampak anak jalanan terutama badut deng anak jalanan” (E/SatpolIPP/20082024)

Fenomena anak jalanan identik dengan kelompok yang sering dianggap menjadi sumber permasalahan sosial. Selain anak jalanan, ada pula gelandangan dan pengemis yang kerap hadir di ruang publik. Anak jalanan sering terlibat dalam perkelahian dan kekerasan, baik antar sesama mereka maupun dengan orang dewasa. Faktor lokasi aktivitas yang berbeda-beda memungkinkan siapa saja menjadi pelaku atau korban tindak kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Motif kekerasan antara lain persaingan hidup di jalan, balas dendam, atau rasa terganggu terhadap keberadaan kelompok lain. Minimnya perlindungan dari aparat juga membuat korban kekerasan sulit mendapatkan keadilan. Ejekan, hinaan, ancaman, makian, dan pemerasan menjadi bentuk kekerasan mental yang paling sering dialami anak jalanan, khususnya mereka yang berusia 15 tahun, termasuk anak perempuan.

Keberadaan anak jalanan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kemiskinan menjadi faktor utama yang memaksa anak-anak turun ke jalan untuk bekerja, meskipun usia mereka seharusnya difokuskan pada pendidikan. Di Kota Gorontalo, fenomena badut jalanan dianggap sebagai simbol perilaku menyimpang, karena anak-anak menampilkan keceriaan untuk menghibur orang lain sekaligus menutupi kesedihan mereka dengan “topeng badut”. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterampilan mereka minim, sehingga opsi pekerjaan di luar jalanan sangat terbatas. Anak-anak ini umumnya bekerja sebagai pengamen, badut jalanan, atau pengemis di lampu merah dan tempat publik lainnya, berharap mendapatkan belas kasih dari masyarakat yang mereka temui. Salah satu informan menyatakan:

“Torang yang ada di Kelurahan Limbah B ini sudah Beberapa tahun tinggal di sini memang banyak sekali anak-anak yang depe orang tua tida jaga urus dan so jaga minta-minta attau mengemis mungkin faktor lingkungan dorang so jadi bagitu”(N/SatpolPP/20082024)

Pernyataan ini menegaskan bahwa penyebab utama anak-anak turun ke jalan adalah kesulitan ekonomi dalam keluarga, meskipun faktor lain, seperti perceraian, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sosial setempat, juga berperan. Beberapa anak memilih bekerja di jalanan secara sukarela untuk membantu perekonomian keluarga, sementara yang lain terpaksa melakukannya karena tekanan ekonomi.

Eksplorasi anak jalanan memiliki berbagai dampak, baik fisik, psikis, maupun sosial.

a. Dampak fisik

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering mengalami kekerasan fisik. Perlakuan kasar ini biasanya muncul ketika anak menolak bekerja atau penghasilan yang diperoleh tidak memenuhi ekspektasi pihak yang mengeksploitasi. Bentuk kekerasan fisik yang diterima meliputi pukulan, tamparan, cubitan, tendangan, dan tindakan serupa lainnya.

b. Dampak psikis

Dampak psikis cenderung tidak terlihat, namun signifikan. Anak jalanan kerap mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak, termasuk Satpol PP, preman, hingga orang tua sendiri. Tekanan psikologis ini semakin berat ketika ada target pendapatan yang harus dipenuhi, sehingga anak merasa tertekan dan cemas.

c. Dampak sosial

Kehidupan di jalanan membuat perilaku anak jalanan cenderung agresif dan kasar. Mereka sering melakukan tindakan seperti menarik baju atau memaksa orang memberi uang, yang sebagian dipengaruhi oleh tekanan dari pihak yang mengeksploitasi mereka. Pergaulan bebas menjadi hal yang sulit dihindari; beberapa anak bahkan terlibat dalam konsumsi alkohol, merokok, atau menggunakan obat terlarang. Lingkungan jalanan yang tidak sesuai dengan usia mereka serta kurangnya perhatian dari orang tua menjadi faktor yang mendorong perilaku menyimpang tersebut.

Fenomena anak jalanan di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks dan tidak muncul secara terisolasi. Krisis ekonomi, bencana, dan keterpurukan finansial orang tua membuat banyak anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, mereka mencari penghasilan di luar rumah, baik untuk membantu keluarga maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi, yang seringkali memaksa mereka meninggalkan sekolah. Anak jalanan sering dikategorikan sebagai kelompok marginal, namun mereka tetap merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan moral agar dapat berkembang secara optimal.

Ketidaberdayaan anak jalanan muncul karena perbedaan situasi sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Kondisi mereka dapat dikategorikan sebagai marginal, karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak menjanjikan masa depan; rentan, karena risiko yang ditanggung akibat jam kerja yang tidak menentu; dan eksploitatif, karena posisi tawar mereka sangat lemah dalam interaksi ekonomi dan sosial.

Upaya perlindungan anak jalanan harus dimulai dengan menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat, untuk menghapus stigma normatif yang memandang mereka sebagai “sampah masyarakat”. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya fokus pada program pemberdayaan sosial, pendidikan, dan bimbingan moral untuk mencegah anak-anak kembali ke jalanan. Anak jalanan merujuk pada mereka yang tinggal di jalanan, baik sementara maupun permanen, sebelum mencapai usia legal 17 tahun. Anak-anak ini sering meninggalkan rumah dan sekolah untuk mencari nafkah, meskipun memiliki keluarga dan tempat tinggal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada anak itu sendiri, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai penertiban anak jalanan oleh Satpol PP di Limba B, Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak jalanan terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Anak-anak tersebut terpaksa turun ke jalan untuk mengemis atau mencari penghasilan, meskipun seharusnya mereka difokuskan pada pendidikan dan pengembangan diri. Kerja sama antara Dinas Sosial dan instansi terkait, seperti Satpol PP, menjadi kunci dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan secara efektif. Upaya penertiban oleh Satpol PP dapat memberikan efek jera sementara dan diharapkan mampu mengurangi jumlah anak yang berada di jalan, meskipun tindakan ini bukan solusi jangka panjang.

Selain faktor ekonomi, kemiskinan menjadi faktor dominan yang memengaruhi perkembangan masalah anak jalanan di Kota Gorontalo. Penanganan pengemis dan anak jalanan selama ini belum mampu memberikan efek jera yang signifikan, sehingga banyak anak kembali ke jalan. Oleh karena itu, upaya pemerintah, khususnya Satpol PP, perlu menyeimbangkan antara penegakan peraturan dengan perlindungan dan pembinaan anak jalanan. Strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar anak-anak ini dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jk9tr>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hidayat, A. (2020). Kebijakan penanganan anak jalanan berbasis pemberdayaan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 67–78. <https://doi.org/10.22146/jsp.2020.67-78>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan

Sukarno Pressindo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21403.54563>
- Nasution, M., & Siregar, R. (2018). Kolaborasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2018.101-112>
- Pratama, R. (2021). Efektivitas kebijakan penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–128. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i2.2021.115-128>
- Sari, D., & Rahma, A. (2019). Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/10.24198/jsh.v10i1.2019.45-56>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28945.56160>
- Wulandari, S. (2022). Faktor penyebab anak jalanan kembali ke jalan setelah pembinaan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.31595/jks.v5i1.2022.23-34>
- Yusuf, A. M. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Prenadamedia Group. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8d3qy>